

Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan UMKM Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Palangkaraya, Kalteng

Meta Melinda Aldis ¹, Lala ², Yomelin Andini ³, Larissa K.T.T. Situmorang ⁴,
Riki Cahyadi ⁵

¹⁻⁵ Universitas Palangka Raya

Korespondensi penulis : metaaldis07@gmail.com ¹, lala23022002@gmail.com ², Yomelinandini3@gmail.com ³,
larissa.situmorang006@gmail.com ⁴, rikic2673@gmail.com ⁵

ABSTRACT. *This research explores the impact of financial inclusion on the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Central Kalimantan, Indonesia, during the 2011-2021 period. Data analysis shows an increase in financial services account ownership from 20% to 52%, contributing to economic growth and a decrease in the unemployment rate. This study highlights the role of government policy in promoting access to financial and supporting services for MSMEs, which is crucial in developing local economies and social welfare. The implications of these findings recommend strengthening financial inclusion policies and increasing support for MSMEs to optimize economic growth and expand employment opportunities in Central Kalimantan.*

Keywords: *Financial Inclusion, MSMEs, Community Welfare*

ABSTRAK. Penelitian ini mengeksplorasi dampak inklusi keuangan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah, Indonesia, selama periode 2011-2021. Analisis data menunjukkan peningkatan kepemilikan akun layanan keuangan dari 20% menjadi 52%, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran. Studi ini menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam mempromosikan akses ke layanan keuangan dan pendukung terhadap UMKM, yang krusial dalam mengembangkan ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial. Implikasi dari temuan ini merekomendasikan penguatan kebijakan inklusi keuangan dan peningkatan dukungan untuk UMKM guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang kerja di Kalimantan Tengah.

Kata kunci : Inklusi Keuangan, UMKM, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan, yang didefinisikan sebagai ketersediaan dan kesetaraan akses ke berbagai layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan layanan pembayaran, yang tidak hanya esensial untuk pertumbuhan individu dan bisnis, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) muncul sebagai aktor kunci dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang, di mana mereka berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan.

Palangkaraya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Indonesia, memiliki peran strategis dalam ekonomi regional dan nasional. Wilayah ini, yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk pengembangan UMKM, berada di

Received: Maret 28, 2024, Accepted: April 16, 2024, Published: April 30, 2024

* Meta Melinda Aldis, metaaldis07@gmail.com

persimpangan jalan untuk memanfaatkan inklusi keuangan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun potensinya yang besar, Palangkaraya, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan akses yang luas dan merata ke layanan keuangan bagi UMKM dan masyarakatnya.

Pentingnya inklusi keuangan bagi UMKM tidak bisa dianggap remeh. UMKM sering kali mengalami kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional karena berbagai alasan, termasuk kurangnya jaminan, rekam jejak kredit yang terbatas, dan struktur biaya yang tinggi. Tanpa akses ke pembiayaan, UMKM kesulitan untuk berkembang, berinovasi, dan berkompetisi di pasar yang semakin global. Ini berarti bahwa inklusi keuangan bukan hanya masalah akses, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, peningkatan akses ke layanan keuangan dapat membantu UMKM di Palangkaraya untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, inklusi keuangan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menyediakan akses ke layanan keuangan, individu dan keluarga dapat lebih baik mengelola risiko keuangan, meningkatkan tabungan, dan berinvestasi dalam pendidikan atau kesehatan, yang semuanya merupakan determinan penting dari kesejahteraan jangka panjang. Di Palangkaraya, di mana sektor informal masih mendominasi perekonomian, inklusi keuangan bisa menjadi katalisator untuk integrasi ekonomi yang lebih luas, memberikan jalan bagi individu dan UMKM untuk berpartisipasi lebih penuh dalam perekonomian formal.

Namun, pencapaian inklusi keuangan yang efektif memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor keuangan, UMKM, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Ini termasuk pengembangan kerangka kebijakan yang mendukung, peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat dan pemilik UMKM, serta penerapan teknologi keuangan (fintech) untuk memperluas jangkauan dan mengurangi biaya layanan keuangan. Di Palangkaraya, inisiatif semacam ini dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang ada dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan kesejahteraan.

Melalui artikel ini, penulisank bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara inklusi keuangan, pertumbuhan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Analisis ini akan menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam mengakses layanan keuangan, serta dampak inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan ini, artikel ini berharap dapat memberikan

wawasan yang berharga dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di Palangkaraya dan wilayah sekitarnya.

TINJAUAN LITERATUR

Inklusi keuangan telah dikenali sebagai salah satu pendorong kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya akses ke layanan keuangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk ekspansi, sementara individu mendapat kesempatan untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka melalui tabungan, kredit, dan produk keuangan lainnya. Penelitian terkini di berbagai wilayah dunia telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara inklusi keuangan dengan pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan masyarakat, menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung ekosistem keuangan yang inklusif.

Ahmad et al. (2020) menggarisbawahi pentingnya teknologi mobile dalam mendukung inklusi keuangan di Afrika, menyoroti bagaimana mobile money telah merubah akses ke layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Teknologi ini membuka peluang baru untuk UMKM dengan menyederhanakan transaksi keuangan dan menurunkan biaya operasional. Hal ini sejalan dengan temuan Atiase et al. (2019), yang mengidentifikasi dampak signifikan kredit mikro oleh Organisasi Non-Pemerintah Keuangan (FNGOs) terhadap pertumbuhan lapangan kerja di Ghana, menunjukkan bagaimana inklusi keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM.

Selanjutnya, Pesqué-Cela et al. (2021) menawarkan pandangan menyeluruh mengenai definisi dan pengukuran inklusi keuangan, menekankan pentingnya inklusi keuangan dalam agenda pembangunan global. Studi mereka menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk memvalidasi berbagai indikator inklusi keuangan, yang menunjukkan bahwa akses dan penggunaan layanan keuangan yang luas memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks serupa, Thattharani et al. (2023) mengeksplorasi bagaimana faktor permintaan, pasokan, dan institusional mempengaruhi inklusi keuangan UMKM di negara berkembang, menunjukkan kompleksitas hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM.

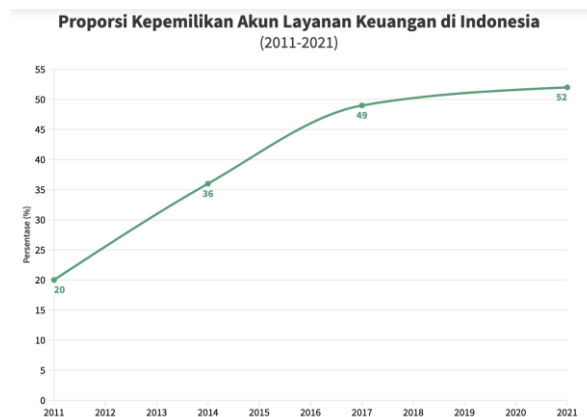
Penelitian oleh Zhang et al. (2023) tentang pengaruh digitalisasi terhadap pembiayaan UMKM di China menyoroti bagaimana teknologi digital telah meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses ke modal bagi UMKM. Temuan ini menggambarkan bagaimana inovasi teknologi dapat mengatasi hambatan tradisional dalam akses keuangan dan mendukung

pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Toure (2021) menambahkan perspektif tentang peran pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi akses ke layanan keuangan dan mengidentifikasi dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan konsensus bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif yang luas, dari peningkatan akses ke layanan keuangan hingga dukungan terhadap pertumbuhan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan inklusi keuangan dalam mencapai tujuan-tujuan ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan inovasi teknologi. Seperti yang dibahas oleh Dorfleitner dan Roble (2018) serta Mahmood et al. (2022), kemajuan dalam inklusi keuangan membutuhkan pendekatan holistik yang mengakui kompleksitas ekosistem keuangan dan kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok masyarakat. Melalui analisis yang mendalam, penelitian-penelitian ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang dinamika inklusi keuangan dan potensinya dalam membentuk masa depan pembangunan ekonomi dan sosial.

PEMBAHASAN

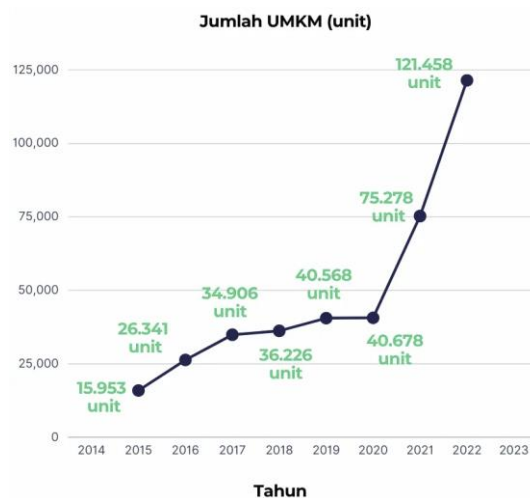
Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, inklusi keuangan telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat dari grafik proporsi kepemilikan akun layanan keuangan di negara ini dari tahun 2011 hingga 2021. Data menunjukkan bahwa persentase populasi dengan akses ke layanan keuangan formal telah meningkat dari 20% pada tahun 2011 menjadi sekitar 52% pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan kesuksesan dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah dan sektor keuangan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada lebih banyak orang.



Sumber: BPS

Peningkatan inklusi keuangan ini tidak terjadi dalam vakum. Ini adalah hasil dari berbagai kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memudahkan akses ke layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, program-program yang ditujukan untuk mempromosikan literasi keuangan di kalangan penduduk, pengembangan produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur keuangan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, telah berkontribusi secara signifikan. Pemerintah juga telah mendorong bank dan lembaga keuangan untuk lebih inovatif dalam menawarkan produk dan layanan yang dapat diakses oleh segmen pasar yang lebih luas, termasuk UMKM dan wirausahawan.

Khusus di Kalimantan Tengah, kebijakan pemerintah terhadap inklusi keuangan, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat telah memainkan peranan krusial. Dengan mengakui pentingnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal, pemerintah provinsi dan kabupaten telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung bisnis ini. Hal ini termasuk penyediaan akses kredit yang lebih mudah, pembinaan kapasitas untuk meningkatkan kualitas produksi dan manajemen usaha, serta fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui berbagai platform.



Sumber: BPS

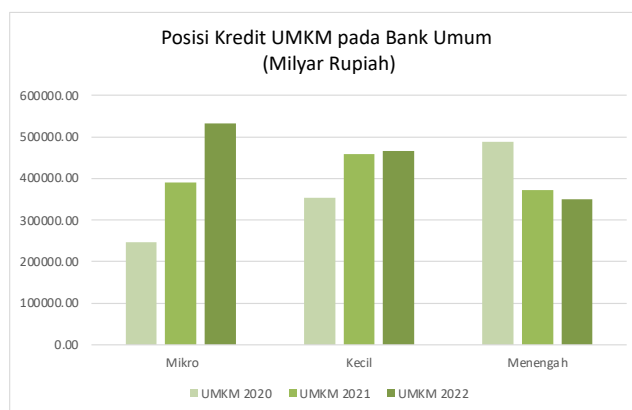
Kenaikan yang dramatis dari tahun 2022 ke 2023, di mana jumlah UMKM hampir menggandakan diri, mungkin menunjukkan suatu titik balik atau hasil dari sebuah inisiatif atau perubahan kebijakan yang signifikan. Ini bisa jadi hasil dari investasi yang ditingkatkan dalam infrastruktur lokal, insentif fiskal, atau program pendukung UMKM yang sukses. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab tepat dari lonjakan ini, namun ada beberapa kemungkinan yang bisa dipertimbangkan.

Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peranan inklusi keuangan yang telah kita bahas sebelumnya. Akses yang ditingkatkan ke layanan keuangan memberikan modal kerja dan investasi yang diperlukan untuk startup dan ekspansi bisnis, yang secara langsung meningkatkan jumlah UMKM. Ketersediaan kredit, kemudahan dalam transaksi finansial, dan proteksi melalui produk asuransi dapat memperkuat fondasi UMKM untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pasar.



Dinamika ekonomi Palangkaraya, sebagai ibu kota Kalimantan Tengah, terlihat melalui lensa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berasal dari sebuah latar belakang dengan 15.953 unit pada tahun 2014, UMKM di Palangkaraya telah melonjak secara signifikan, menjadi simbol kegigihan dan inovasi lokal. Peningkatan jumlah UMKM menjadi 121.458 unit pada tahun 2023 mencerminkan bukan hanya pertumbuhan numerik, tetapi juga perluasan peluang ekonomi yang meluas dan semangat wirausaha yang merebak di kota ini.

Tren positif ini mungkin diakibatkan oleh serangkaian kebijakan dan inisiatif yang sukses, yang mungkin termasuk investasi yang meningkat dalam infrastruktur lokal, insentif fiskal, dan dukungan terhadap UMKM yang memperkuat ekosistem ekonomi Palangkaraya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh inklusi keuangan, di mana akses yang lebih besar ke layanan finansial memberikan modal kerja dan investasi yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Dengan fasilitas kredit yang lebih mudah, transaksi finansial yang lebih efisien, dan produk asuransi yang membantu memitigasi risiko, UMKM di Palangkaraya diberi dasar yang lebih kuat untuk tumbuh dan bersaing.



Sumber: BPS

Dari tahun 2020 ke 2021, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyaluran kredit di semua kategori, yang mungkin mencerminkan respon terhadap kebijakan pemerintah untuk merangsang ekonomi selama atau setelah dampak pandemi COVID-19. Inisiatif ini mungkin termasuk relaksasi syarat kredit, subsidi bunga, atau program jaminan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga aliran likuiditas ke sektor UMKM.

Penurunan pada tahun 2022, khususnya di segmen usaha kecil dan menengah, bisa jadi karena berbagai faktor, seperti pengetatan kredit, perubahan dalam kebijakan fiskal atau moneter, atau mungkin karena UMKM mulai stabil dan tidak memerlukan kredit tambahan setelah periode pemulihan. Penurunan ini bisa juga menandakan adanya pergeseran dalam strategi pendanaan UMKM, dari pinjaman bank ke sumber pendanaan alternatif atau internal.

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021			
Nama Kabupaten	2020	2021	2022
Kab. Kotawaringin Barat	4.76	4.7	4.51
Kab. Kotawaringin Timur	5.25	5.15	5
Kab. Kapuas	4.98	4.91	3.91
Kab. Barito Selatan	4.21	4.16	3.53
Kab. Barito Utara	5.29	5.14	4.82
Kab. Katingan	5.69	5.5	5.33
Kab. Seruyan	4.3	4.25	3.96
Kab. Sukamara	4.7	4.65	6.46
Kab. Lamandau	2.83	2.3	3.41
Kab. Gunung Mas	2.49	3.11	2.96
Kab. Pulang Pisau	2.63	2.6	1.96
Kab. Murung Raya	3.1	3.03	2.77
Kab. Barito Timur	2.91	3.22	2.95
Kota Palangkaraya	5.95	5.86	5.64

Sumber: BPS

Palangkaraya menunjukkan sedikit penurunan tingkat pengangguran dari tahun 2020 ke 2022, dari 5,95% menjadi 5,64%. Penurunan ini mungkin terdengar kecil, namun hal ini tetap menunjukkan kemajuan, apalagi jika dikaitkan dengan pertumbuhan UMKM di kota tersebut. Pertumbuhan UMKM di Palangkaraya tidak hanya berkontribusi pada keragaman ekonomi, tetapi juga pada penciptaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Peningkatan kepemilikan akun layanan keuangan menandakan bahwa warga Palangkaraya memiliki akses yang lebih baik ke layanan finansial, yang esensial untuk mendukung ekspansi bisnis kecil dan mikro. Ini penting, terutama mengingat Palangkaraya tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga pusat perdagangan dan jasa.

Fakta bahwa Palangkaraya memiliki tingkat pengangguran tertinggi di antara daerah yang tercatat dalam data tersebut menandakan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan, masih ada ruang yang cukup untuk perbaikan. Fokus pemerintah daerah mungkin perlu diarahkan pada penciptaan kebijakan yang tidak hanya mendorong pembukaan usaha baru tetapi juga pada pengembangan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan kualitas lapangan kerja.

Strategi pengembangan ekonomi di Palangkaraya harus mencakup dukungan bagi sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, termasuk teknologi, pariwisata, dan layanan kreatif, yang semuanya bisa mendatangkan manfaat signifikan bagi kota. Sebagai contoh, pengembangan pariwisata yang berbasis pada kekayaan alam dan budaya lokal dapat menciptakan berbagai peluang kerja yang tidak hanya berjumlah banyak tetapi juga berkualitas. Selain itu, penting bagi Palangkaraya untuk memanfaatkan statusnya sebagai ibu kota provinsi dalam menarik investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih luas. Dengan infrastruktur yang baik, kebijakan yang mendukung, dan inisiatif yang berfokus pada pengembangan UMKM, Palangkaraya memiliki potensi untuk mengurangi tingkat pengangguran lebih lanjut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 hingga 2021, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM. Peningkatan akses ke layanan keuangan formal telah memberikan modal kerja dan kemudahan transaksi yang esensial bagi pertumbuhan UMKM, yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun terdapat fluktuasi dalam distribusi kredit dan

tingkat pengangguran yang bervariasi antar kabupaten/kota, trend keseluruhan menunjukkan kemajuan ekonomi yang positif.

Pemerintah daerah Palangkaraya dan Kalimantan Tengah harus terus menerapkan kebijakan yang mendorong inklusi keuangan dan mendukung UMKM untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fokus pada pengembangan sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti teknologi, pariwisata, dan layanan kreatif dapat menciptakan peluang kerja berkualitas dan berdampak luas. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja serta memperbaiki infrastruktur untuk mendukung investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih luas, yang akan berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A.H., Green, C., & Jiang, F. (2020). MOBILE MONEY, FINANCIAL INCLUSION AND DEVELOPMENT: A REVIEW WITH REFERENCE TO AFRICAN EXPERIENCE. *Journal of Economic Surveys*, 34, 753-792. <https://doi.org/10.1111/joes.12372>
- Atiase, V. Y., Wang, Y., & Mahmood, S. (2019). FNGOs and financial inclusion: Investigating the impact of microcredit on employment growth in Ghana. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 20(2), 90-106. <https://doi.org/10.1177/1465750319832478>
- Dorfleitner, G., & Roble, S. (2018). Financial inclusion and the growth of small medium enterprises in Uganda: Empirical evidence from selected districts in Lango sub-region. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. <https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/>
- IMF Working Papers. (2019). SME financial inclusion for sustained growth in the Middle East and Central Asia. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2019/209/article-A001-en.xml>
- Mahmood, S., Shuhui, W., Aslam, S., & Ahmed, T. (2022). The Financial Inclusion Development and Its Impacts on Disposable Income. *Sage Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221093369>
- Pesqué-Cela, V., Tian, L., Luo, D., Tobin, D., & Kling, G. (2021). Defining and measuring financial inclusion: A systematic review and confirmatory factor analysis. <https://doi.org/10.1002/jid.3524>
- Thatsarani, S., Jianguo, W., & Alariqi, M. (2023). How Do Demand, Supply, and Institutional Factors Influence SME Financial Inclusion: A Developing Country Perspective. *Sage Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231187603>

- Toure, T.A. (2021). Financial Inclusion and Welfare: New Evidence on the Role of Government. In: Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E., García-Gómez, C.D. (eds) Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 19. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77438-7_20
- Usama, K. M., & Yusoff, W. F. (2019). The Impact of Financial Literacy on Business Performance. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 3(10), 84-91. https://www.researchgate.net/publication/322938783_Financial_Inclusion_and_Financial_Sector_Stability_With_Reference_To_Kenya_A_Review_of_Literature
- Zhang, X., Li, J., Xiang, D., & Worthington, A. C. (2023). Digitalization, financial inclusion, and small and medium-sized enterprise financing: Evidence from China. Economic Modelling, 126, 106410. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106410>